

## **ABSTRAK**

### **PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PNS YANG BERPOLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum baik itu kedudukannya sebagai suami ataupun juga Istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perkawinan membentuk suatu keluarga yang menjadi salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Termasuk juga pada peraturan pelaksanaan perkawinan poligami yang berlaku khusus pada Undang-undang Perkawinan dan peraturan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengkaji dan menganalisis Keabsahan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpoligami dengan memanipulasi data kependudukan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perkawinan, serta mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap isteri kedua dan status anak yang dilahirkan pada perkawinan poligami Pegawai Negeri Sipil tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yakni dengan menggunakan keseluruhan data, baik itu data primer maupun data sekunder, serta mengkaji berbagai literatur dan hasil informasi wawancara yang ditarik menjadi suatu kesimpulan dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan poligami PNS yang memanipulasi data kependudukan dengan mengakui identitasnya masih perjaka, dan tidak ada surat izin menikah lagi dari istri pertama serta instansi terkait pekerjaannya sebagai PNS tentu tidaklah sah secara Agama maupun Negara, maka dari itu perkawinan tersebut seharusnya bisa dibatalkan atas pengajuan gugatan pembatalan perkawinan dari pihak yang merasa dirugikan atas perkawinan poligami PNS tersebut.

**Kata Kunci : manipulasi data kependudukan, PNS poligami,**

**Perkawinan Poligami**

## **ABSTRACT**

### **ANNULMENT OF MARRIAGE FOR MANIPULATION OF POPULATION DATA IN THE ENVIRONMENT OF POLYGAMOUS CIVIL SERVANTS IN TERMS OF LAW NUMBER 24 OF 2013 CONCERNING POPULATION ADMINISTRATION RELATED TO THE MARRIAGE LAW**

*Marriage is a legal event that has legal consequences, its position as a husband or also a wife, property or children born from the marriage. Marriage forms a family that becomes one of the elements in social and state life bases on laws and regulations. This includes the regulations for the implementation of polygamous marriages which apply specifically to the marriage Law and other regulations. The purpose of this research was to review and analyze the marriage of Polygamous Validity of Civil Servants (PNS) by manipulating population data based on the Population Administration Law and the Marriage Law, as well as to review and analyze the legal protection of the second wife and the status of children born in polygamous marriages of civil servants. This research used a qualitative juridical analysis method, by using the entire data, both primary and secondary data, as well as reviewing various literature and interview information results drawn into a conclusion based on the laws and regulations related to this research. The results of this research concluded that the polygamous marriage of a civil servant who manipulates population data by admitting his identity was still a virgin, and there was no license to remarry from the first wife and related agencies of his work as a civil servant was certainly not valid religiously or state widely therefore the marriage should be canceled upon filing a lawsuit for annulment of marriage from the party who felt aggrieved by the civil servant's polygamous marriage.*

**Keywords: Manipulation of population data, Polygamous civil servants, Polygamous marriage**